

**ANALISIS PENGELOUARAN APBN PADA BIDANG PENDIDIKAN DAN PERKEMBANGAN PENERIMA KIP MAHASISWA TAHUN 2022–2025****Jelita Angeli Purba**

Universitas Negeri Medan

Agnes Anggreni Tamba

Universitas Negeri Medan

Krisentia Angelina Napitu

Universitas Negeri Medan

Raja Parnaungan Munthe

Universitas Negeri Medan

Erickson Sinaga

Universitas Negeri Medan

Alamat: Jl. William Iskandar Ps. V, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan,

Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20221

*Korespondensi penulis: jelitapurba2006@gmail.com, ahassberastagi@gmail.com,
krisentianapitu@gmail.com, rajaparnaungan09@gmail.com, eriksinaga419@gmail.com*

Abstrak: This study aims to analyze government spending in the education sector and the development of KIP College (KIP Kuliah) recipients during the 2022–2025 period. The data show that the increase in education spending in 2022–2024 contributed to the growing number of KIP College recipients, thereby expanding access to higher education for students from low-income families. However, in 2025, despite another rise in the education budget, the number of recipients did not increase due to stricter verification measures to ensure accurate targeting. The findings indicate that the KIP College program has been fairly effective, but still faces challenges such as mismatched economic data and limited access to information in several regions. These results highlight that budget increases must be accompanied by improvements in data management to optimize the implementation of educational assistance programs.

Keywords: Smart Indonesian College Card, APBN, education budget, equal access to higher education, government policy

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan serta perkembangan jumlah penerima KIP Kuliah selama periode 2022-2025. Data menunjukkan bahwa peningkatan anggaran pendidikan pada 2022-2024 berpengaruh pada bertambahnya jumlah penerima KIP Kuliah, sehingga akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu semakin terbuka. Namun pada 2025, meskipun anggaran pendidikan kembali meningkat, jumlah penerima KIP Kuliah tidak bertambah karena adanya pengetatan verifikasi untuk memastikan ketepatan sasaran bantuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program KIP Kuliah berjalan cukup efektif, tetapi masih menghadapi tantangan seperti ketidaksesuaian data ekonomi dan keterbatasan informasi di beberapa daerah. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan anggaran perlu dibarengi dengan perbaikan sistem pendataan agar program bantuan pendidikan dapat berjalan lebih optimal.

Kata kunci: KIP Kuliah, APBN, Anggaran pendidikan, Pemerataan Akses Pendidikan Tinggi, Kebijakan Pemerintah.

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah sektor yang sangat krusial dalam pembangunan bangsa karena secara langsung berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah Indonesia menunjukkan dedikasinya dengan terus meningkatkan anggaran untuk pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahunnya. Menurut Todaro (2011), pendidikan merupakan salah satu bentuk investasi dalam

pembangunan yang dapat memfasilitasi mobilitas sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penempatan anggaran pendidikan menjadi strategi yang krusial untuk menciptakan pemerataan dalam akses pendidikan, termasuk melalui program KIP Kuliah. Salah satu tindakan konkret pemerintah dalam memperluas akses pendidikan tinggi adalah penyaluran bantuan KIP Kuliah kepada mahasiswa dari keluarga kurang mampu.

Keterlibatan negara dalam pendanaan pendidikan ini sejalan dengan pendapat Musgrave (1959), yang menyatakan bahwa pemerintah memiliki tugas untuk menyediakan layanan publik, termasuk dalam bidang pendidikan. Dengan demikian, harapan meningkatnya anggaran pendidikan adalah agar mahasiswa berpendapatan rendah memiliki lebih banyak kesempatan untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi. Walaupun anggaran untuk pendidikan terus bertambah, penting untuk memperhatikan efisiensi penggunaannya. Hanushek and Woessmann (2015) mengingatkan bahwa besaran anggaran tidak selalu menjamin hasil yang memuaskan tanpa diiringi dengan kebijakan yang baik dan tepat sasaran. Hal ini menjadi sangat penting terkait perkembangan program KIP Kuliah, terutama dengan adanya perubahan kebijakan pada tahun 2025 dimana jumlah penerima tidak akan meningkat meskipun anggarannya bertambah.

Pemerintah lebih ketat dalam verifikasi untuk memastikan bahwa bantuan tersebut hanya diberikan kepada mahasiswa yang benar-benar memerlukan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran pendidikan tidak hanya bergantung pada jumlahnya, tetapi juga pada efektivitas distribusi program yang ada. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengeluaran pemerintah dalam sektor pendidikan, perkembangan jumlah penerima KIP Kuliah, serta mengevaluasi efektivitas dan tantangan program hingga tahun 2025. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai sejauh mana kebijakan anggaran pendidikan mendukung pemerataan akses pendidikan tinggi secara berkelanjutan.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengeluaran Pemerintah untuk Pendidikan

Pengeluaran dari pemerintah dalam bidang pendidikan dianggap sebagai investasi jangka panjang yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Teori keuangan publik yang diusulkan oleh Musgrave (1959) menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah diperlukan untuk memberikan layanan publik penting, termasuk pendidikan, yang tidak dapat secara efektif disediakan oleh mekanisme pasar. Di Indonesia, penetapan anggaran untuk pendidikan mengikuti amanat dari UUD 1945 Pasal 31, yang mengharuskan setidaknya 20% APBN dialokasikan untuk sektor pendidikan. Sebuah penelitian oleh Saragih (2020) mengungkapkan bahwa peningkatan anggaran pendidikan berkontribusi terhadap pemerataan akses dan kualitas pendidikan, terutama pasca desentralisasi pendidikan. Di sisi lain, Studies, (2024) menemukan bahwa adanya kenaikan anggaran pendidikan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan partisipasi dalam pendidikan tinggi di berbagai wilayah.

2. Pemerataan Akses Pendidikan Tinggi

Pemerataan dalam pendidikan tinggi menjadi salah satu isu utama dalam upaya pembangunan nasional. Dan et al., (2021), menggarisbawahi bahwa keadaan ekonomi keluarga memegang peranan penting dalam kelangsungan pendidikan tinggi. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah dari pemerintah untuk mengurangi kesenjangan dalam akses pendidikan. Sebagai contoh, sebuah penelitian oleh di (Fukaro, 2025), Indonesia menunjukkan bahwa mahasiswa dari keluarga dengan pendapatan rendah mengalami kendala keuangan yang berat dalam melanjutkan pendidikan tinggi. Bantuan finansial telah terbukti meningkatkan peluang mereka untuk diterima dan menyelesaikan studi di perguruan tinggi.

3. Program KIP Kuliah sebagai Instrumen Pemerataan

KIP Kuliah adalah program bantuan pendidikan yang ditujukan untuk mahasiswa yang kurang mampu, bertujuan untuk memperluas akses terhadap pendidikan tinggi yang inklusif. Program ini menawarkan pembebasan UKT serta bantuan biaya hidup yang disesuaikan dengan indeks harga di daerah masing-masing Kemendikbud, (2020). Prestasi et al., n.d. , menunjukkan bahwa KIP Kuliah berhasil meningkatkan partisipasi mahasiswa dari keluarga yang rentan, terutama di perguruan tinggi negeri. Sedangkan Muhammad et al.,(2025), menemukan bahwa program ini juga berkontribusi dalam menurunkan jumlah mahasiswa yang putus studi, meskipun masih terdapat tantangan terkait distribusi yang merata antarwilayah dan verifikasi penerima bantuan.

4. Hubungan Anggaran APBN dan Perkembangan Penerima KIP Kuliah

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengidentifikasi adanya hubungan antara besar anggaran pendidikan dengan kemampuan pemerintah untuk memperluas program bantuan pendidikan. Putri (2022) menegaskan bahwa peningkatan anggaran pendidikan memungkinkan pemerintah untuk secara signifikan menambah jumlah penerima beasiswa. Di samping itu, Saleh et al.,(2023), menyoroti pentingnya keberlanjutan alokasi anggaran pendidikan yang stabil sebagai faktor kunci untuk menjaga jumlah penerima KIP Kuliah setiap tahunnya. Secara keseluruhan, literatur yang ada menunjukkan bahwa ada hubungan yang kuat antara peningkatan anggaran pendidikan dan keberadaan kebijakan afirmatif seperti KIP Kuliah, dalam mendukung akses pendidikan tinggi yang lebih merata. Kedua aspek ini menjadi landasan penting bagi pemerintah dalam usaha mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Studi ini menerapkan metode kualitatif deskriptif untuk menggambarkan serta menganalisis alokasi anggaran pendidikan dalam APBN dan perkembangan penerima KIP Kuliah antara tahun 2022 hingga 2025. Metode kualitatif dipilih karena fokus penelitian ini adalah untuk memahami konteks kebijakan, menginterpretasi data, dan menganalisis makna yang terkait dengan tren anggaran dan jumlah penerima dukungan pendidikan. Menurut Tarnoki, (2019), pendekatan kualitatif memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menyelami fenomena secara mendalam dengan memanfaatkan beragam sumber data, sehingga sangat cocok untuk mengkaji dinamika dalam kebijakan pendidikan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang

dikumpulkan dari dokumen resmi pemerintah seperti laporan APBN dari Kementerian Keuangan, laporan KIP Kuliah dari Kemendikbudristek, publikasi dari Badan Pusat Statistik (BPS), serta penelitian dan jurnal terkait yang relevan.

Penggunaan data sekunder diambil karena penelitian ini memerlukan informasi historis dan kebijakan yang terstruktur dengan baik. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan literatur, di mana peneliti mengumpulkan, menganalisis, dan membaca dokumen resmi, laporan statistik, dan temuan riset sebelumnya yang relevan dengan anggaran pendidikan dan program KIP Kuliah. Analisis data dilakukan dengan metode analisis deskriptif kualitatif, mengikuti langkah-langkah yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang dipaparkan oleh Miles dan Huberman (2014). Pada tahap reduksi data, peneliti menyaring dan memilih informasi yang signifikan dari seluruh dokumen yang ada. Selanjutnya, data disusun dalam bentuk narasi yang menggambarkan perkembangan alokasi dan jumlah penerima KIP Kuliah dari tahun ke tahun.

Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan, yang dimana merupakan proses menginterpretasikan data untuk menemukan pola, hubungan, dan implikasi kebijakan yang mampu menjelaskan seberapa efektif dan bagaimana arah perkembangan program bantuan pendidikan tersebut. Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dari berbagai dokumen resmi, penerbitan akademik, dan laporan statistik untuk memastikan konsistensi serta akurasi informasi. Selain itu, hanya sumber data yang diakui dan dapat dipercaya yang digunakan, sehingga hasil penelitiannya memiliki tingkat validitas yang tinggi. Dengan pendekatan ini, diharapkan studi dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai hubungan antara pengeluaran APBN di bidang pendidikan dengan perkembangan penerima KIP Kuliah selama periode 2022 hingga 2025.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan ini mengeksplorasi bagaimana alokasi anggaran pendidikan mempengaruhi jumlah penerima KIP Kuliah selama tahun 2022 hingga 2025. Analisis dilakukan dengan mengkaji tren pertumbuhan anggaran dan jumlah penerima, serta memberikan pemahaman teori untuk menilai sejauh mana kebijakan ini berperan dalam pemerataan akses ke pendidikan tinggi. Dengan pendekatan ini, bagian berikut menyajikan hasil analisis secara terstruktur.

1. Analisis Pengeluaran APBN Pada Bidang Pendidikan Tahun 2022-2025

Pengeluaran pemerintah dalam sektor pendidikan adalah upaya krusial untuk memperluas akses dan pemerataan pendidikan di tanah air. Peningkatan anggaran pendidikan dalam APBN untuk periode 2022 hingga 2025 menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memperkuat pengembangan sumber daya manusia. Ini sejalan dengan ketentuan dalam UUD Pasal 31 ayat 4 (1945), yang menyatakan bahwa negara harus mengalokasikan minimal 20% dari anggaran untuk sektor pendidikan. Peningkatan ini juga mendukung program bantuan pendidikan seperti KIP Kuliah yang menjadi fokus utama penelitian ini. Menurut Musgrave (1959), salah satu tanggung jawab pemerintah adalah alokasi, yaitu menyediakan layanan publik yang tidak dapat dioptimalkan oleh pasar, termasuk pendidikan. Peningkatan anggaran pendidikan dari

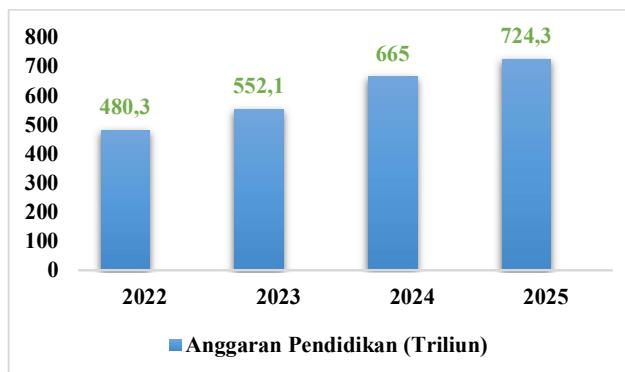
2022 hingga 2025 mencerminkan fungsi alokasi itu, di mana pemerintah memastikan bahwa akses terhadap pendidikan tersedia secara adil bagi semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berpenghasilan rendah.

Tabel 1. Alokasi Anggaran Pendidikan Nasional Tahun 2022-2025

ALOKASI ANGGARAN PENDIDIKAN TAHUN 2022-2025	
2022	542,8 T
2023	612,2 T
2024	665,0 T
2025	724,3 T

(Sumber: APBN 2022-2025)

Tabel 1, ini menunjukkan adanya peningkatan alokasi anggaran setiap tahunnya. Pada tahun 2022 anggaran pendidikan tercatat sebesar Rp542,8 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp612,2 triliun di tahun 2023. Pada tahun 2024, anggaran mencapai Rp665,0 triliun dan terus meningkat menjadi Rp724,3 triliun pada 2025. Peningkatan ini tidak hanya memenuhi kewajiban 20%, tetapi juga menunjukkan bahwa pemerintah semakin memprioritaskan sektor pendidikan. Peningkatan anggaran tersebut diperkuat oleh pernyataan Musgrave (1959), bahwa investasi pemerintah dalam layanan publik adalah langkah strategis untuk memastikan pemerataan kesempatan belajar.



Grafik 1. Jumlah Alokasi Anggaran Pendidikan Tahun 2022-2025

Jika dilihat dari tabel dan grafik menunjukkan adanya peningkatan anggaran pendidikan dari Rp542,8 triliun pada tahun 2022, menjadi Rp724,3 triliun pada tahun 2025 menunjukkan tren kenaikan yang konsisten dan menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat pendanaan pendidikan. Sejalan dengan pandangan Hanushek dan Woessmann (2015) bahwa mutu pendidikan ditentukan oleh efektivitas pengelolaan anggaran, stagnannya jumlah penerima KIP Kuliah pada 2025 mencerminkan fokus kebijakan yang bergeser pada peningkatan kualitas, akurasi data, dan efektivitas program, bukan sekadar perluasan jumlah penerima. Dengan demikian, data visual dan pandangan para ahli mendukung analisis bahwa alokasi APBN 2022-2025 diarahkan untuk pemerataan akses, peningkatan mutu, serta penguatan tata kelola program seperti KIP Kuliah, yang menjelaskan kenaikan jumlah penerima hingga 2024 sebelum stabil pada 2025.

2. Tren Perkembangan KIP Kuliah Tahun 2022-2025

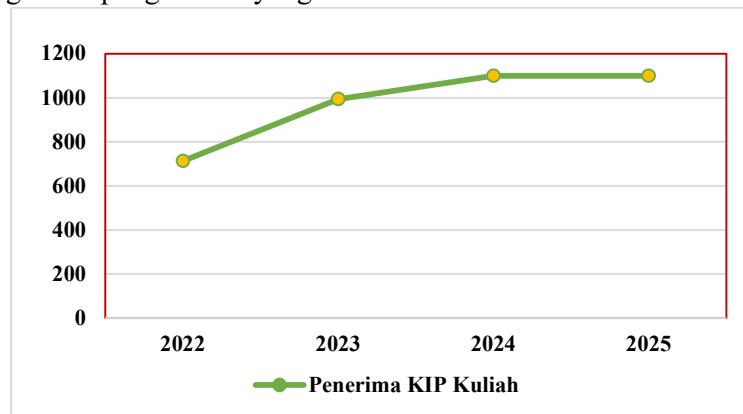
KIP Kuliah adalah inisiatif dari pemerintah yang bertujuan membantu mahasiswa dari latar belakang ekonomi kurang mampu untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi. Pertumbuhan jumlah penerima KIP Kuliah antara tahun 2022 hingga 2025 mencerminkan bagaimana pemerintah memanfaatkan anggaran pendidikan demi meningkatkan akses pendidikan yang merata. Dalam konteks teori, kebijakan ini sejalan dengan Teori Keadilan Rawls (1971) yang menekankan bahwa dukungan publik harus diarahkan kepada kelompok yang paling rentan. Dengan kata lain, semakin banyak mahasiswa berpenghasilan rendah yang menerima KIP Kuliah, semakin baik kebijakan ini dalam mendukung prinsip keadilan tersebut.

Tabel 2. Jumlah Penerima KIP Kuliah Tahun 2022-2025

JUMLAH PENERIMA KIP KULIAH TAHUN 2022-2025	
2022	713,8 Ribu Jiwa
2023	994,3 Ribu Jiwa
2024	1,1 Juta Jiwa
2025	1,1 Juta Jiwa

(Sumber: APBN 2022-2025)

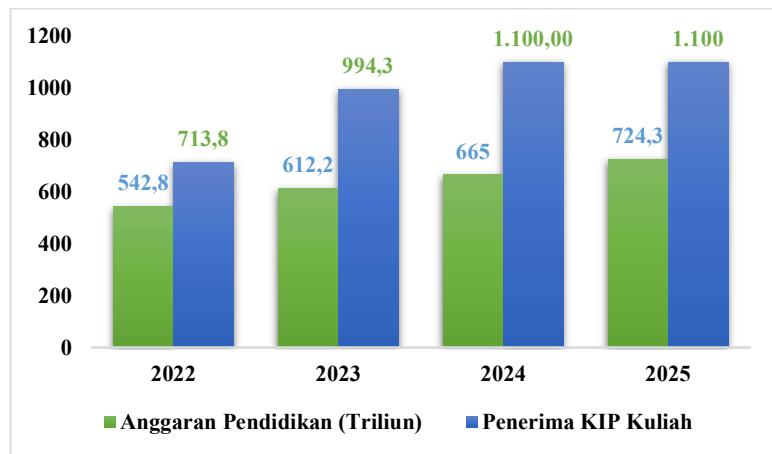
Melalui tabel tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah penerima mengalami peningkatan dari tahun 2022 hingga 2024, kemudian stabil pada tahun 2025. Pertumbuhan awal menunjukkan adanya perluasan akses, namun kestabilan jumlah penerima pada tahun 2025 dikarenakan pemerintah mulai memperketat proses verifikasi untuk memastikan bantuan tersebut benar-benar tepat sasaran. Pernyataan dari Nadiem Makarim (Rapat Kerja Komisi X DPR, 2024) mengemukakan bahwa tantangan utama program KIP Kuliah adalah menjamin bahwa bantuan hanya diterima oleh mahasiswa yang berhak, sehingga pengumpulan data dan validasi menjadi lebih ketat. Di samping itu, kestabilan jumlah penerima juga sejalan dengan pandangan dari Hanushek dan Woessmann (2015) yang menyatakan bahwa mutu pendidikan tidak hanya ditentukan oleh besaran anggaran, melainkan juga oleh pengelolaan yang efektif.



Grafik 1. Jumlah Penerima KIP Kuliah Tahun 2022-2025

Grafik 1, memperlihatkan adanya tren yang meningkat antara 2022 hingga 2024, lalu mendatar pada tahun 2025. Pola ini mengindikasikan bahwa kebijakan pemerintah kini lebih mengutamakan ketepatan sasaran dibandingkan hanya menambah jumlah penerima.

3. Analisis Hubungan Antara Pengeluaran APBN dan Perkembangan Penerima KIP Kuliah



Grafik 3. Jumlah Pemerataan Alokasi Anggaran Penerima KIP Kuliah Tahun 2022-2025

Dari grafik 3, menunjukkan adanya hubungan antara anggaran pemerintah untuk sektor pendidikan dan jumlah penerima KIP Kuliah dapat dilihat melalui grafik gabungan yang menunjukkan perkembangan anggaran pendidikan dan jumlah penerima bantuan dari tahun 2022 sampai 2025. Secara umum, ketika dana pendidikan mengalami peningkatan, jumlah orang yang menerima KIP Kuliah juga cenderung naik. Namun, pada tahun terakhir menunjukkan adanya perubahan arah kebijakan. Secara teori, hal ini sejalan dengan pandangan Musgrave (1959) yang menyatakan bahwa salah satu peran penting pemerintah adalah fungsi alokasi, yaitu menyediakan layanan publik seperti pendidikan. Ketika anggaran pendidikan meningkat, kemampuan pemerintah untuk memberikan bantuan pendidikan juga ikut bertambah. Oleh karena itu, pada periode 2022–2024, terlihat bahwa kenaikan anggaran mendorong peningkatan jumlah penerima KIP Kuliah.

Namun, di tahun 2025, meskipun dana pendidikan masih mengalami kenaikan, jumlah penerima KIP Kuliah tidak mengalami peningkatan. Situasi ini disebabkan oleh pemerintah yang mulai memperketat proses verifikasi data agar bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran. Pendekatan ini sesuai dengan pendapat Hanushek dan Woessmann (2015) yang menyatakan bahwa efektivitas kebijakan pendidikan tidak ditentukan oleh besar kecilnya anggaran, tetapi oleh seberapa bijak dana itu digunakan. Pernyataan ini sejalan dengan penjelasan Sri Mulyani (2024) dalam konferensi pers RAPBN 2025, di mana anggaran pendidikan yang besar harus digunakan secara efektif dan memberikan dampak langsung, bukan hanya untuk meningkatkan jumlah penerima bantuan.

4. Efektivitas Program KIP, Tantangan dan Implikasi Kebijakan

Secara keseluruhan, program KIP Kuliah dapat dianggap cukup berhasil hingga tahun 2025. Keberhasilannya terlihat dari peningkatan jumlah penerima antara 2022 hingga 2024 serta perbaikan dalam proses verifikasi yang dilakukan pada tahun 2025. Hal ini sejalan dengan pendapat Mahmudi (2010) yang menyatakan bahwa efektivitas diukur dari pencapaian tujuan program secara optimal, yaitu menjangkau mahasiswa yang benar-benar memerlukan bantuan. Keberhasilan ini juga didukung oleh kebijakan yang diambil pemerintah. Dalam Rapat Kerja Komisi X DPR pada bulan Maret 2024, Mendikbudristek Nadiem Makarim menjelaskan bahwa pihak pemerintah memperketat validasi data KIP Kuliah karena tantangan utama program ini adalah memastikan bahwa bantuan diberikan pada yang tepat, bukan hanya sekadar menambah jumlah penerima.

Selain itu, dalam Konferensi Pers RAPBN 2025 yang diadakan pada Agustus 2024, Menteri Keuangan Sri Mulyani menekankan bahwa anggaran pendidikan yang besar harus dimanfaatkan dengan tepat serta memberikan dampak secara langsung, sehingga pemerintah memperkuat sistem verifikasi pada tahun 2025. Pandangan ini sejalan dengan pendapat yang menekankan bahwa efektivitas dalam pengelolaan anggaran publik ditentukan oleh ketepatan sasaran dan manfaat yang diberikan. Walaupun dianggap efektif, KIP Kuliah masih menghadapi berbagai tantangan hingga tahun 2025:

- a) Ketidakcocokan data ekonomi keluarga, yang menyebabkan beberapa mahasiswa yang membutuhkan belum terdaftar dalam DTKS.
- b) Kurangnya informasi yang dipahami, terutama di daerah terpencil, mengenai cara pendaftaran dan proses verifikasi.
- c) Kemungkinan salah sasaran, yang mengakibatkan penerima dari keluarga yang mampu kadang-kadang dapat lolos dari verifikasi.

Tantangan ini berkaitan dengan pendapat Hanushek dan Woessmann (2015) bahwa faktor penghalang dalam kebijakan pendidikan umumnya disebabkan oleh masalah implementasi serta pengelolaan data, bukan hanya sekadar masalah anggaran.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis, mengenai pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan serta perkembangan program KIP Kuliah antara 2022 dan 2025, dapat disimpulkan bahwa peningkatan dana untuk pendidikan memberikan efek positif terhadap akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari keluarga yang kurang beruntung. Kenaikan anggaran selama 2022 sampai 2024 beriringan dengan meningkatnya jumlah penerima KIP Kuliah, yang menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah efektif dalam meningkatkan pemerataan pendidikan. Namun, pada tahun 2025 terjadi perubahan dalam arah kebijakan. Walaupun anggaran pendidikan masih meningkat, jumlah penerima KIP Kuliah tidak bertambah karena pemerintah mulai mengetatkan proses verifikasi untuk memastikan bahwa bantuan diberikan kepada yang tepat.

Kebijakan ini menunjukkan bahwa fokus kini berpindah dari penambahan kuota ke peningkatan kualitas dan ketepatan dalam penyaluran bantuan. Dengan demikian, secara keseluruhan, kebijakan KIP Kuliah sudah berjalan dengan baik, meskipun masih menghadapi beberapa tantangan seperti ketidakcocokan data dan kurangnya informasi di beberapa wilayah. Diperlukan perbaikan dalam sistem pendataan dan validasi agar

bantuan dapat tepat sasaran kepada mahasiswa yang memang memerlukan, serta agar penggunaan anggaran pendidikan bisa lebih efisien.

SARAN

Berdasarkan hasil analisis, disarankan agar pemerintah terus memperkuat akurasi dan pembaruan data penerima KIP Kuliah agar bantuan benar-benar diterima oleh mahasiswa yang membutuhkan. Sosialisasi mengenai prosedur pendaftaran juga perlu ditingkatkan, terutama di daerah yang akses informasinya masih terbatas. Selain itu, efektivitas penggunaan anggaran pendidikan sebaiknya terus menjadi prioritas melalui evaluasi rutin dan pengawasan penyaluran bantuan. Perguruan tinggi juga diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam proses administrasi dan verifikasi data agar pengajuan KIP Kuliah berjalan lebih lancar. Untuk penelitian selanjutnya, peneliti dapat memperluas cakupan analisis dengan menilai dampak KIP Kuliah terhadap keberlanjutan studi atau hasil akademik mahasiswa, sehingga gambaran efektivitas program dapat lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriliana, O. Y. (2017). *ANALISIS KELAYAKAN ISI DAN BAHASA BUKU TEKS SISWA BAHASA INDONESIA KURIKULUM 2013 KELAS VII SMP / MTs TERBITAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI EDISI REVISI TAHUN 2017 THE ANALYSIS OF CONTENT AND LANGUAGE FEASIBILITY TEXT BOOK STUDENTS BAHASA INDONESIA CURRICULUM 2013 CLASS VII SMP / MTs ISSUE OF THE MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE RI OF EDITION 2017*
- Barokah, N., Kamal, R., Islam, U., Abdurrahman, N. K. H., & Pekalongan, W. (2025). *Pembelajaran Kontekstual sebagai Inovasi Kreatif dalam Menjadikan Materi Ajar Lebih Bermakna*.
- Dan, A. P., & Arifi, A. (n.d.). *MUTU PENDIDIKAN (Respon Kebijakan Anggaran Pendidikan 20 % dari APBN Bagi Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah)*.
- Dan, K., Hidup, G., & Perilaku, T. (2021). *MAHASISWA UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA Prodi Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Sebelas Maret*. 7(2), 1–12.
- Fukaro, A. (2025). *Pengaruh Latar Belakang Sosial terhadap Kesempatan Pendidikan*. 7(2), 1214–1220.
- Larasati, A. D., Dinda, D., Aidah, N. A., Gustiputri, R., Neisyah, S., & Isyak, R. (2022). *ANALISIS KEBIJAKAN PROGRAM BEASISWA KARTU INDONESIA PINTAR-KULIAH (KIP-K) DI UNIVERSITAS*. 5(September).
- Muhammad, R., Saputra, I., Rahmadhani, O. K., Hikmayanti, N. S., & Amelia, F. (2025). *Kontribusi Program KIP-K terhadap Peningkatan Motivasi dan Sikap Belajar Mahasiswa di Universitas Tidar*. 1, 1–16.
- Prestasi, D. A. N., Mahasiswa, B., Arsandy, Q. S., Karolin, L., & Sinuhaji, R. D. (n.d.). *PENGARUH BEASISWA KIP-KULIAH TERHADAP MOTIVASI*. 5158, 67–77. <https://doi.org/10.24815/jp.v>
- Ramadhana, A. M. N., Ummam, N., Qodarina, N., Istika, P., & Siregar, R. (2023). *KENDALA DAN KELEMAHAN SISTEM PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA*

- SEKTOR PUBLIK : SUATU TINJAUAN.* 3(1), 63–71.
- Riau, D. I. U. (2021). *IMPLEMENTASI KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH (KIP-KULIAH)*. 4, 1112–1120. <https://doi.org/10.35817/jpu.v4i4.21837>
- Rohaeni, N. E., & Saryono, O. (2018). *Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Upaya Pemerataan Pendidikan.* 2(1).
- Saleh, S., Brata, J. T., Makassar, U. N., & Tenggara, U. S. (2023). *Peran Pemerintah dalam Mendorong Kualitas Pelayanan Pendidikan di Indonesia The Government 's Role in Encouraging the Quality of Education Services in Indonesia.* 5(2).
- Studies, E. (2024). *Journal Research and Education Studies.* 5(1), 1–12.
- Sufni, N. (2024). *Analisis Keberhasilan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Meningkatkan Akses Pendidikan di Indonesia.* 2(2), 38–45.
- Tarnoki, C. (2019). *Something for Everyone : A Review of Qualitative Inquiry and Research Design : Choosing among Five Approaches Something for Everyone : A Review of Qualitative Inquiry and Research Design : 24(12), 3122–3124.*
- Zaini, P. M., Zaini, P. M., Saputra, N., Penerbit, Y., Zaini, M., Lawang, K. A., & Susilo, A. (2023). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Issue May).
- Zamjani, I. (2018). *PELAKSANAAN PROGRAM INDONESIA PINTAR BAGI PENERIMA KARTU INDONESIA PINTAR REGULER: STUDI DI EMPAT DAERAH KUNJUNGAN KERJA PRESIDEN TAHUN 2017 THE IMPLEMENTATION OF SMART INDONESIA PROGRAM FOR THE RECIPIENTS OF CONVENTIONAL SMART INDONESIA CARD : THE STUDY IN FOUR DISTRICTS OF PRESIDENT 'S WORKING.* 11.